

Analisis Gagal Bayar Piutang Biaya Pendidikan di Badan Pusat Statistik: Studi Kuantitatif dan Kualitatif = Analysis on Default of Education Costs Receivable at the Statistics Indonesia: Quantitative and Qualitative Study

Resa Rasyadan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566857&lokasi=lokal>

Abstrak

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan piutang negara, termasuk piutang biaya pendidikan yang timbul akibat wanprestasi perjanjian ikatan dinas tugas belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik demografi, pembiayaan, institusi pendidikan, dan variabel lainnya terhadap gagal bayar piutang biaya pendidikan (Tuntutan Ganti Kerugian Negara Kasus Wanprestasi Perjanjian Ikatan Dinas Tugas Belajar) di BPS. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-methods dengan desain explanatory sequential, yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi logistik biner dengan data debitur periode 1983–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel usia, nilai piutang, dan periode pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Sebaliknya, jenis kelamin, status kampus, lokasi kampus, dan periode pembayaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam memberikan wawasan tambahan terkait hambatan dalam optimalisasi penyelesaian piutang, strategi institusi ke depan, serta implementasi kebijakan yang memengaruhi proses pengelolaan piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi data kuantitatif dan wawasan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi gagal bayar. Temuan ini berimplikasi pada penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem seleksi beasiswa, penerapan kebijakan insentif dan hukuman yang tepat, peningkatan koordinasi antar unit, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program tugas belajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang negara biaya pendidikan serta menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi sektor publik.

.....Statistics Indonesia (BPS), as a government institution, is responsible for managing state receivables, including education cost receivables arising from the breach of duty-bound scholarship agreements. This study aims to analyze the influence of demographic, financing, educational institution characteristics, and other variables on the default of education cost receivables (State Compensation Claim Due to Breach of Duty-Bound Scholarship Agreement) in BPS. The research employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design, integrating quantitative and qualitative analyses.

The quantitative analysis applies binary logistic regression using data from debtors between 1983 and 2022. The results indicate that age, loan amount, and education period significantly influence the risk of default. Conversely, gender, campus status, campus location, and payment periods show no statistically significant effects. The qualitative approach, conducted through in-depth interviews, provides additional insights into barriers to optimizing receivable settlements, institutional strategies, and policy implementation affecting the receivables management process.

The findings reveal that combining quantitative data and qualitative insights offers a more holistic

understanding of the factors influencing default. These findings have implications for designing more adaptive policies, such as strengthening the scholarship selection system, implementing appropriate incentives and punishments, enhancing inter-unit coordination, streamlining administrative processes, and reinforcing regulations to ensure the sustainability of duty-bound scholarship programs. This study is expected to contribute to improving the effectiveness of managing education cost receivables and serve as a reference for formulating relevant policies in the public sector.